



E-KTP Difabel Dimulai Selasa

Tak Semua Dilaksanakan Secara Door to Door

YOGYA, TRIBUN - Pelaksanaan perekaman data wajib kartu tanda penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) bagi kaum difabel tidak semuanya dilaksanakan secara *door to door*. Perekaman data *mobile* akan berada di titik terdekat dengan lokasi warga yang memiliki keterbatasan fisik. Hanya warga yang benar-benar secara fisik tidak mampu datang ke tempat pelayanan e-KTP *mobile* yang akan didatangi petugas.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta, Nur Affandi, Jumat (2/12). Ia menambahkan, konsep pendekatan ke sasaran ini dipilih dengan pertimbangan supaya waktu lebih efektif.

"Jika perekaman semua dilakukan secara *door to door* atau mendatangi rumah

„ Jika perekaman semua dilakukan secara *door to door* atau mendatangi rumah satu persatu, akan lebih lama „

NUR AFFANDI

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta

satu persatu, akan lebih lama. Maka itu alat e-KTP *mobile* akan berada di satu titik yang berdekatan dengan data warga yang secara fisik sulit datang ke kecamatan. Mereka dipersilakan berjalan sekitar 100-200 meter untuk mendatangi titik tersebut," jelasnya.

Sebelumnya pihak kantor Nur berencana menjemput bola, *door to door*, dalam perekaman semua warga difabel. Namun hal itu dibatalkan karena diyakini akan memakan waktu lama mengingat di setiap kecamatan

ada 50 orang-80 orang yang memiliki berketerbatasan fisik.

"Saat ini sudah ada delapan kecamatan yang memberi laporan data warga yang difabel. Selasa (6/12) depan kami harap sudah bisa dilakukan perekaman data *mobile*," tambahnya.

Untuk melaksanakan proses perekaman data *mobile* ini, Disdukcapil akan menerjunkan tiga petugas terdiri atas seorang koordinator dan dua operator di setiap kecamatan. Hanya, kata Nur, bantuan alat e-KTP

mobile dari pusat baru satu yang dikirim, 26 November lalu. "Masih kurang dua alat bantuan *mobile*," katanya.

Infomasi lain, hingga saat ini hampir 200.000 orang sudah melakukan perekaman data KTP elektronik, dari sekitar 330.000 warga wajib KTP yang ada. Jumlah tersebut setara 60 persen.

Secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Chang Wendryanto, menilai pelaksanaan program nasional kependudukan dari Jakarta (pusat) itu masih mengandung banyak kekurangan. Selama ini pusat hanya bisa menuntut daerah namun tidak bisa memberikan sarana secara cepat. "Pengiriman alat saja terlambat. Termasuk bantuan perekaman data *mobile*. Tapi maunya akhir tahun ini selesai," kritiknya. (evn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005